

# Komitmen Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai hijau: Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa dewan perwakilan cabang Kota Surabaya

Safira Rafidah Rahmah<sup>1\*</sup>, Ucu Martanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga

\*E-mail: safirarafidah17@gmail.com

**Abstract:** This study discusses the commitment of green parties who care about the environment. The green party is the result of public dissatisfaction with the old conservative party which rarely prioritizes environmental interestS. It means that this green party has a role to participate in fighting for environmental issues into public policy. In Indonesia, until now there is only one political party that has declared themselves as a green party that cares about the environment, and the name is Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). This qualitative research explains that the declaration of PKB as a green party must be followed by a real work program related to the environment. The results of this study refer to the PKB's point of view on the environment in the city of Surabaya, such as in the process of escorting natural disaster management programs and policies, also building community awareness to be more environmentally friendly through changing the patterns of behaviour. Meanwhile, proving the PKB party as a green party that cares about the environment can be seen from the performance that has been taken to fight for environmental issues, for examples, the Ecodesantren, Jambanisasi, Biopori and Reduction of plastic waste programs. However, the regulatory affairs of PKB's commitment as a green party are still considered to be insignificant.

**Keywords:** *Green party, Partai Kebangkitan Bangsa, environmental politics*

## PENDAHULUAN

Apabila membahas mengenai politik lingkungan maka erat kaitannya dengan proses keadilan, di mana dalam proses pembangunan harus mengutamakan keselamatan ekologi karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan makhluk hidup lain. Namun dewasa ini lingkungan hidup hanya dijadikan sebagai komoditas semata untuk memenuhi kepentingan manusia, pengeksploitasian sumber daya alam yang berlebihan akan membawa dampak pada ketidakseimbangan lingkungan dan berakhir dengan kerusakan alam. Fenomena tersebut sering kali ditemui di kota besar akibat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kelangkaan air bersih, pencemaran limbah, penumpukan sampah, polusi udara dan ancaman terjadinya bencana alam.

Kerusakan lingkungan hidup yang marak terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terdapat kebijakan yang gagal, meluasnya pola kebudayaan konsumtif dan rendahnya komitmen politik. Untuk itu dibutuhkan pembuatan kebijakan yang lebih baik, penguatan komitmen politik dan menciptakan gagasan baru yang pro lingkungan. Partai politik dinilai memiliki peranan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga dalam perkembangannya partai politik dianggap mampu untuk mengakomodasi kepentingan rakyat. Sebagai sarana komunikasi politik,

partai politik juga dapat membuka ruang publik untuk bersama-sama mendiskusikan tentang isu permasalahan yang selama ini sedang terjadi, tidak terkecuali mengenai permasalahan lingkungan hidup. Karena selama ini masyarakat cenderung pasif dalam menanggapi permasalahan degradasi lingkungan. Hadirnya partai hijau dianggap sebagai suatu pembaharuan yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan pemerintah terkait kebijakan lingkungan, kesejahteraan rakyat dan transformasi pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam upaya untuk ikut serta menjaga kualitas lingkungan hidup Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai politik di Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai partai hijau oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar pada tanggal 26 Februari 2007 di Bali. Namun baru disahkan secara payung regulasi pada Muktamar PKB ke-4 tahun 2014 di Surabaya. Hal yang melatar belakangi pendeklarasian tersebut yaitu berangkat dari kekhawatiran PKB tentang penurunan mutu kualitas lingkungan hidup. Konsep partai hijau yang diusung oleh PKB meliputi tiga nilai dasar, yakni nilai keberagaman, nilai universal dan nilai konstitusi.

Keterlibatan PKB sebagai partai hijau dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah membutuhkan peranan rakyat di dalamnya, karena rakyat berfungsi sebagai akar demokrasi mempunyai hak pilih untuk menentukan seorang legislator dan partai politik yang menjadi perwakilannya. Hubungan rakyat sebagai konstituen dengan legislator dan partai politik dianggap sangat strategis untuk menjadi perantara kepada pemerintah dengan cara mendengarkan aspirasi dan keluhan rakyat, legislator dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada lembaga legislatif dan kepada partai politik mereka masing-masing untuk ditinjau lebih lanjut. Dengan demikian para legislator tersebut akan terbekali untuk merancang dan mengubah kebijakan sebagai bentuk timbal balik atas aspirasi rakyat. Partai politik juga dapat mengumpulkan informasi melalui partisipasi aktif rakyat untuk memastikan apakah program kerja yang dilaksanakan sudah menanggulangi permasalahan yang terkait.

Oleh karena itu kepercayaan rakyat terhadap suatu partai politik tertentu mempengaruhi arah berjalannya sistem politik. Pada pemilihan umum 2014 PKB merupakan salah satu partai politik dengan suara terbanyak, khususnya di wilayah Kota Surabaya, yakni dengan memperoleh 119.742 suara dan mendapatkan 5 kursi di DPRD. Tentu perolehan suara tersebut bukan hal yang mengejutkan mengingat basis massa warga Nahdliyin sangat kuat. Kepercayaan publik kepada PKB dianggap sebagai keuntungan khusus untuk ikut mendukung program kerja dan kebijakan yang pro lingkungan.

Dalam penelitian sebelumnya, Supratiwi (2013) meneliti tentang peranan dan kepedulian lima partai politik dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu 2009 yaitu partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PKS, PAN dan Golkar terhadap lingkungan hidup melalui program kerja dan platform serta pandangan

kelima parpol tersebut untuk mewarnai dan menentukan arah kebijakan di Kota Semarang selama lima tahun periode kerja. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak partai politik yang tidak memiliki ketertarikan terhadap masalah lingkungan, dari kelima partai politik tersebut juga jarang memasukkan isu lingkungan hidup ke dalam visi dan misi partainya. Namun melalui perwakilan partai politik yang berada di tingkatan legislatif sudah dilakukan beberapa upaya untuk turut serta menanggulangi bencana banjir dan rob di Kota Semarang pada periode 2004-2009. Sedangkan untuk periode 2009-2014 kelima partai politik tersebut belum mempersiapkan program secara khusus untuk kelestarian lingkungan hidup.

Dapat disimpulkan dari penelitian Supratiwi (2013) bahwa partai politik saat ini sangat jarang untuk mengutamakan perihal lingkungan hidup dalam agenda politiknya, sering kali hanya berfokus pada peningkatan ekonomi dan perebutan kekuasaan. Sehingga hal tersebut mendasari untuk dilakukan penelitian ini, PKB sebagai partai politik yang telah mendeklarasikan diri sebagai partai hijau harus dinilai seberapa jauh komitmennya untuk ikut serta memperjuangkan lingkungan hidup di Kota Surabaya melalui program kerja dan platform yang telah direncanakan.

Pada periode 2014-2019 PKB telah memiliki beberapa program spesifik yang ramah lingkungan di Kota Surabaya dan juga PKB telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas terkait lain untuk membuktikan keterlibatannya dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. Sementara penelitian Efriza (2019) mengenai Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik, menyatakan bahwa perkembangan partai politik di era reformasi berjalan dengan pesat. Pentingnya peranan partai politik sebagai pilar sistem demokrasi membuat kedudukan partai politik tidak bisa tergantikan, berangkat dari pemahaman tersebut partai politik memiliki fungsi sebagai sarana untuk manusia atau masyarakat dalam membentuk suatu organisasi dengan tujuan mewujudkan aspirasinya. Namun dalam perkembangannya partai politik cenderung mengarah ke defisit demokrasi di mana partai politik kurang responsif terhadap masyarakat dan konstituennya dan hanya fokus terhadap peralihan jumlah suara terbanyak setiap pemilihan umum. Sehingga, pembentukan dan pemeliharaan konstituen melalui ikatan ideologis tidak lagi menjadi agenda kerja partai. Padahal tujuan utama daripada terbentuknya partai politik agar dapat memfasilitasi suara-suara rakyat dalam proses demokrasi, terlebih permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya terjadi dalam lingkup sosial dan ekonomi saja, terdapat permasalahan lingkungan hidup yang juga mendesak untuk dituntaskan. Dengan demikian dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui fungsi dari PKB sebagai partai hijau, apakah tetap bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat terkait lingkungan hidup atau tidak.

Green Parties atau Partai hijau adalah partai politik yang menganut paradigma hijau, artinya semua pendekatan dan arah pembangunannya berbasis dan lebih mengutamakan kepada keselamatan ekologi,

kepentingan masyarakat lapis bawah dan pembangunan berkelanjutan. Dari pendekatan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk mempengaruhi proses politik di parlemen (Dobson 2007), sedangkan menurut Muller-Rommel (1994) menyatakan bahwa partai hijau berfungsi sebagai kendaraan politik bagi masyarakat yang selama ini diabaikan oleh partai politik lain, partai hijau akan melakukan pembaharuan dan perubahan kebijakan di pemerintahan mengenai masalah ekologis. Terdapat tiga prasyarat utama untuk membuktikan komitmen suatu partai politik terhadap lingkungan, yaitu pertama prinsip keselamatan artinya PKB harus mempunyai aturan ketat dalam urusan regulasi terkait lingkungan hidup, kedua prinsip HAM yaitu PKB sebagai partai hijau yang peduli lingkungan harus mengutamakan pendekatan hak asasi manusia dan Ketiga prinsip komunitas di mana PKB harus berdasarkan komunitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meneliti bagaimana jalannya fenomena terkait dengan data yang ditemukan di lapangan serta tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Fokus penelitian ini mencakup bagaimana komitmen PKB sebagai partai hijau yang peduli lingkungan di Kota Surabaya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi akan dikelompokkan dan dianalisis untuk menjawab semua pertanyaan penelitian.

### **Pandangan PKB terhadap Lingkungan Hidup di Kota Surabaya**

Kehadiran partai hijau dalam perkembangan kota urban seperti Kota Surabaya memiliki peranan penting untuk ikut serta mengawal program kerja dan kebijakan penanggulangan bencana alam, pasalnya kota urban sering kali memiliki permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan fungsi air, air sebagai sumber kehidupan memiliki nilai dan manfaat yang besar akan tetapi dalam prosesnya dapat pula membawa bencana yaitu banjir dan longsor. Terjadinya bencana alam dapat dikaitkan dengan pertumbuhan kepadatan penduduk yang tinggi dan beralihnya fungsi lahan. Serta peningkatan jumlah penduduk di Kota juga membawa dampak bagi ekosistem, yakni semakin meningkatnya kebutuhan lahan maka semakin banyaknya sampah rumah tangga yang beredar dan meningkatnya kebutuhan sumber daya. Oleh karena itu wilayah perkotaan sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir.

Bencana banjir adalah bencana alam yang terjadi pada saat musim hujan, akibat dari penyumbatan drainase, penimbunan sampah di aliran sungai dan tingginya curah hujan. Dari perspektif PKB sebagai partai hijau yang peduli lingkungan, membagi tanggapannya mengenai fenomena lingkungan tersebut ke dalam dua hal, yaitu untuk menanggulangi permasalahan lingkungan di Kota Surabaya harus membedakan mana yang program partai politik dan mana yang merupakan program legislatif.

Apabila bersangkutan dengan program partai politik maka tanggapan yang bisa diberikan hanya sebatas pemahaman dan sosialisasi kepada kader dan simpatisan dari basis masyarakat Nadhliyin yang bisa dijaring melalui pengurus tingkatan ranting. Karena partai politik di Indonesia sebagian besar masih menganut paham politik keras yaitu memperebutkan kekuasaan sehingga tindakan yang bisa dilakukan oleh partai hijau hanya sebatas mendukung setiap keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan program pengelolaan lingkungan hidup seperti pembangunan berkelanjutan, pembuatan taman dan kerja bakti. Dukungan yang diberikan kepada pemerintah bukan tanpa alasan, pasalnya dalam sistem pemerintahan sendiri sudah terdapat skala prioritas, kemampuan analisis dan terdapat *goodwill* daripada kinerja itu sendiri, sedangkan tanggapan yang diberikan oleh perwakilan kader PKB di tingkatan legislatif atau DPRD adalah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga serta *stakeholder* pakar lingkungan untuk membuat RESTRA atau rencana strategis tahun 2020 dan membuat rancangan pembuatan *blueprint* saluran air. Pembangunan saluran air menjadi poin utama dalam rencana strategis tersebut sebab Dinas Pekerjaan Umum tidak memiliki *blueprint* dalam artian skala desainnya belum terencana dengan rapi, apabila terjadi penyumbatan saluran memang saluran tersebut akan segera diperbaiki namun pembuatan saluran baru itu tidak akan terintegrasi dengan saluran lama sehingga tidak bisa diketahui apakah kedua saluran tersebut bermuara ke tempat yang sama. Maka dari itu tujuan daripada pembuatan RESTRA untuk mengatur dan menata ulang skema saluran air di Kota Surabaya agar nantinya untuk penanggulangan bencana banjir ataupun sumbatan saluran drainase lebih mudah dan efektif. Selama proses perencanaan RESTRA wakil kader dari PKB berperan aktif untuk menyumbang berbagai usulan sesuai dengan keluhan yang telah diterima dari masyarakat luas.

Di sisi lain dalam menanggapi permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya dibutuhkan adanya sinergitas antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan legislatif. Terdapat perubahan pola perilaku di masyarakat bahwasanya masyarakat Kota saat ini condong untuk menyukai hal yang instan tanpa proses di dalamnya, sebagaimana masyarakat lebih memilih untuk membayar iuran petugas kebersihan ketimbang ikut dalam kegiatan kerja bakti. Dibutuhkan adanya perubahan paradigma secara mendasar untuk mensosialisasikan pentingnya kebersihan kepada masyarakat agar memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya sendiri. Sebab apabila pemerintah dan legislatif telah membuat suatu program kerja namun tidak diimplementasikan oleh masyarakat maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Di sinilah peranan partai PKB sebagai partai hijau berfungsi yaitu untuk memberikan pendidikan politik lingkungan bagi masyarakat luas, pendidikan yang dilakukan tidak harus langsung berskala besar dan masif. Dimulai dari mencontohkan pola perilaku yang ramah lingkungan kepada masyarakat dan

sosialisasi mengenai hubungan antara kerusakan lingkungan dengan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dimasa yang akan datang.

### **Kinerja PKB untuk Mewujudkan Politik yang Pro Lingkungan di Kota Surabaya**

Sebagai partai kader tentunya PKB mempunyai perwakilan yang berada di tingkatan legislatif, terlebih jumlah kursi yang didapatkan oleh PKB pada periode tahun 2014-2019 terdapat 5 kursi dan di antaranya merupakan sekretaris Komisi C yang menaungi bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Dalam proses dinamikanya anggota legislatif memiliki tiga fungsi. Pertama, fungsi *budgetting* yaitu mengalokasikan anggaran dana untuk menjalankan program. Kedua, fungsi *controlling* di mana setelah melakukan pembahasan mengenai pembagian anggaran maka akan dilanjutkan dengan proses peninjauan dari hasil penggunaan dana tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, fungsi legislasi yaitu setelah melalui proses penganggaran dana dan pembahasan maka anggota legislatif dapat mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA).

Dengan mendeklarasikan diri sebagai partai hijau yang peduli lingkungan, komitmen PKB perlu dikaji dari sisi program kerja, platform dan kebijakan yang telah dihasilkan, karena langkah yang telah diambil oleh PKB harus dipertanggungjawabkan tidak hanya berhenti di slogan saja melainkan harus bisa dibuktikan secara nyata lewat keseriusan untuk menjaga stabilitas lingkungan. Terdapat tiga prinsip utama yang dapat dikaitkan antara program PKB terhadap lingkungan hidup dengan dasar teori partai hijau yang tercantum dalam jurnal Mueller Rommel (1994). Yaitu prinsip berbasis komunitas di mana PKB dapat memberikan wawasan lingkungan hidup kepada komunitas tertentu untuk mengubah citra daripada komunitas yang bersangkutan. Contohnya, program Ecomesantren yakni upaya yang dilakukan untuk memberikan predikat kepada suatu lembaga atau institusi pendidikan Islam agar bisa menjadi lebih ramah lingkungan melalui lomba setiap tahunnya. Tujuan daripada program ini untuk mendorong tingkat kepedulian, kesadaran dan pengetahuan warga pondok pesantren terhadap usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup berdasarkan ajaran agama Islam.

Di Kota Surabaya sendiri program lomba Ecomesantren sudah dijalankan selama 2 tahun terakhir oleh partai PKB yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat sosialisasi, kampanye dan lomba kebersihan pesantren yang dilaksanakan sebagai bentuk daripada pesan yang dibawa oleh PKB untuk peduli lingkungan. Program ini lahir berdasarkan hasil inisiatif perwakilan PKB di tingkat legislatif untuk bersama-sama memperjuangkan ketika pembahasan RAPBD. Dengan adanya lomba Ecomesantren ini dapat mengetahui secara langsung keadaan lingkungan di pondok pesantren, karena menurut data saat penjurian sekitar 60% dari 5 pondok pesantren yang dikunjungi masih banyak yang tidak memiliki tempat sampah di setiap kamar, sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dan kekurangan air bersih. Padahal dalam ajaran agama Islam telah

tercantum Hadist yang berbunyi “*Anadafatul Minal Iman*” yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Harusnya dengan adanya pedoman langsung dari syariat Islam bisa meningkatkan kepedulian penghuni pondok pesantren terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Yang kedua prinsip HAM yakni PKB dalam menjalankan fungsinya harus mengedepankan pendekatan hak asasi manusia artinya dalam proses pembangunan PKB tidak boleh pro terhadap pemilik modal melainkan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat lapis bawah. Program yang bisa mencerminkan prinsip tersebut adalah Jambanisasi, seperti yang telah diketahui bahwa permasalahan lingkungan di kota urban adalah sanitasi yang buruk, yaitu masih banyak masyarakat dipinggir kota yang belum mempunyai jamban pribadi di rumah dan masih banyak pula masyarakat yang dalam satu perkampungan hanya memiliki satu jamban di WC umum sehingga terpaksa untuk buang air besar di sungai. Masyarakat luas pun masih belum kritis untuk menanggapi masalah kesehatan yang akan timbul akibat dari buang air besar sembarangan, di mana masih banyak stigma bahwasanya penyakit kulit merupakan hal biasa dan tidak akan menyebabkan kematian padahal stigma tersebut salah besar. Untuk itu kembali lagi kader PKB memberi perhatian dengan menganggarkan dana untuk program 1000 jamban gratis di wilayah Surabaya Utara.

Sebelum terwujudnya program kerja ini, telah diadakan survei di daerah Surabaya Utara, terutama di kampung Hangtuh, Kelurahan Ujung, Semampir. Yang membuat kampung ini menjadi perhatian lebih karena perbandingan kepadatan penduduk dengan akses jalan yang sempit dan mayoritas masyarakat tidak memiliki WC atau jamban di dalam kamar mandinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota metropolitan sekelas Kota Surabaya masih terdapat wilayah dengan tingkat sanitasi rendah.

Yang ketiga yaitu prinsip keselamatan ekologi harus berfokus untuk mengatur kebijakan dan regulasi yang berasaskan pendekatan ekologi, dalam ini mencakup dua program yaitu pembuatan perda mengenai pengurangan sampah plastik dan program biopori. Program kerja yang lahir sebagai bentuk daripada peduli lingkungan oleh PKB sebenarnya sudah terintegrasi dengan program utama yang dimiliki oleh Walikota Tri Rismaharini, yaitu program penghijauan. Program penghijauan saat ini telah menjadi fokus utama untuk dilakukan secara berkelanjutan maka dari itu terdapat program lubang Biopori untuk ikut serta mendukung program yang pro lingkungan. Pembangunan lubang biopori adalah pembangunan lubang resapan air hujan di mana ketika nanti musim hujan telah tiba maka resapan air hujan tersebut akan mengalir melalui lubang biopori untuk mencegah terjadinya genangan air atau banjir, karena akibat intensitas curah hujan yang tinggi saluran drainase atau sungai biasanya tidak mampu untuk menampung debit air. Manfaat lain dari adanya program ini di antara lain dapat meminimalisir terjadinya genangan dan mengolah sampah organik.

Proses pembangunan lubang biopori yakni dengan menancapkan pipa-pipa kecil di jalan, di pot tanaman dan di tengah jalan aspal, agar nantinya sistem kerja lubang biopori dapat berfungsi secara maksimal. Jika pada saat musim hujan terdapat sampah olahan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam lubang biopori untuk kemudian diendapkan dan bisa menjadi pupuk, dengan dibantu oleh rekan-rekan legislatif lainnya perwakilan kader PKB di DPRD berhasil menganggarkan sebanyak 500 titik lubang biopori.

Sehubungan dengan kampanye pengurangan sampah plastik di Kota Surabaya, PKB menilai bahwasanya sampah plastik yang beredar saat ini sangat banyak, diperlukan payung regulasi baru untuk pembatasan sampah plastik. Usulan mengenai pembuatan regulasi akan tertuang ke dalam peraturan daerah baru. Namun dalam prosesnya rancangan perda baru ini masih akan melewati banyak proses di dalamnya.

Demi mewujudkan program pengurangan sampah plastik diperlukan adanya dua upaya, yakni upaya jangka panjang dan upaya jangka pendek. Upaya jangka panjang meliputi pembuatan perda khusus untuk membatasi penggunaan plastik, rancangan perda ini murni berangkat dari inisiatif fraksi PKB di tingkat legislatif sebagai bentuk usulan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Usulan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti dengan adanya kajian bersama pemerintah dan pakar lingkungan hidup dalam aspek ekonomi dan sosial, di mana pada aspek ekonomi nantinya akan diteliti lebih dalam apakah secara ekonomi tidak merugikan dan dari aspek sosial juga apakah dengan pergantian kantong plastik menjadi tas ramah lingkungan akan dapat mengurangi jumlah pemakaian plastik atau tidak, beberapa hal tersebutlah yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut. Setelah semua indikator sudah terpenuhi dan sudah dikeluarkan pernyataan resmi oleh staf ahli maka selanjutnya akan dibentuk pasal per pasal yang akan dikirimkan ke DPRD untuk di sahkan.

Saat pembuatan perda juga terdapat alur mekanisme yang ada di DPRD yakni terdapat alat kelengkapan seperti komisi, badan anggaran dan badan musyawarah. Ketika sudah terdapat usulan dan inisiatif yang masuk dan sudah berhasil dianggarkan dikomisi maka nantinya akan dibawa ke badan anggaran dan selanjutnya ke badan musyawarah, biasanya saat berada di badan musyawarah sering terjadi dinamika antara legislatif dan eksekutif. Di sinilah peran perwakilan kader PKB sangat penting untuk mengamankan, sebelumnya sudah terdapat laporan hasil rapat komisi yang dibahas secara internal oleh fraksi PKB, selanjutnya dari fraksi PKB akan menugaskan kadernya sesuai dengan pembagian komisi di DPRD untuk mengamankan program-program yang telah disepakati tadi. Pengamanan dilakukan mulai dari badan anggaran, setelah itu naik lagi ke rapat paripurna. Meskipun dalam proses pembuatan perda membutuhkan waktu yang cukup panjang dan terdapat banyak dinamika di dalamnya namun kader-kader PKB masih dengan aktif untuk ikut memperjuangkan berarti hal tersebut sudah menunjukkan adanya wujud nyata dari konsep peduli lingkungan itu sendiri.

Pada 1 Mei 2019 lalu, terdapat perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 tahun 2019. Peraturan daerah ini juga merupakan salah satu kebijakan yang telah dihasilkan dari usulan dan inisiatif PKB, memang untuk perda mengenai pembatasan sampah plastik masih dalam proses penyempurnaan, namun untuk perda ini sudah disahkan secara resmi. Perda mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya berisi mengenai aturan baru bagi pembuangan sampah peralatan medis, di mana saat ini marak sekali klinik kecantikan yang berdiri namun sampah daripada alat-alat medis tidak memiliki pengolahan sendiri dan tempat pembuangan sendiri, sehingga hasil akhir sampah medis tercampur dengan sampah lain dan tentunya menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu dibutuhkan adanya regulasi terkait pengklasifikasian sampah agar hasil akhir sampah bisa terbagi ke dalam beberapa bagian agar ke depannya ketika akan di-*recycle* dapat lebih mudah dan efektif.

Selain itu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan guna untuk menyukseskan program pengurangan sampah plastik yakni dengan melakukan giat atau kampanye bahaya sampah plastik. Pasalnya anggota legislatif memiliki kekuatan untuk dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik melalui perilaku yang dicontohkan, seperti pemahaman masyarakat saat ini hanya sebatas memilah sampah plastik dan non-plastik untuk dijual kembali padahal tujuan daripada pemilahan sampah tersebut untuk mengurangi beban sampah. Dengan begitu peranan kader-kader PKB dari berbagai tingkatan dapat digerakkan mulai dari RT,RW, Mudin hingga semua *stakeholder* yang berada di elemen masyarakat dalam pelaksanaan kampanye bahaya plastik. Contohnya selama tahun politik ini banyak sekali kader partai melalui calon legislatif yang menggunakan tas ramah lingkungan sebagai alat kampanyenya, calon legislatif tersebut menyatakan apabila tidak memilih PKB ataupun dirinya tetapi fungsi dari tas lingkungan bisa tepat sasaran, tidak hanya itu pola perilaku yang dicontohkan oleh kader-kader PKB seperti saat solat jumat mengganti tas kresek wadah sandal dan sepatu dengan kain bekas. Tentunya pola perilaku kecil ini jika dilakukan secara berkelanjutan akan membawa dampak positif pula bagi masyarakat.

## SIMPULAN

Dengan membuktikan komitmen PKB sebagai partai hijau di Kota Surabaya peneliti mengetahui bahwa peranan partai hijau yang tepat yaitu dengan ikut berproses dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengolah, mengawasi dan mensosialisasikan kebijakan yang telah dihasilkan, lalu harus terdapat sinergitas antara masyarakat, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk mewujudkan pembaharuan yang pro lingkungan. Terlebih banyak sekali masyarakat luas yang belum mengetahui bahwa prinsip dan asas yang dibangun oleh PKB sebagai partai hijau bukan semata-mata karena partai

Islam, namun sebagai penegasan bahwa partai PKB peduli terhadap lingkungan, terbukti dari program dan platform yang telah dibangun, bekerja sama dengan Dinas terkait untuk kepentingan lingkungan dan memberikan pendidikan politik bagi konstituennya untuk kembali menjaga stabilitas ekosistem.

PKB secara terus menerus harus menunjukkan eksistensinya sebagai partai hijau kepada masyarakat luas, karena hingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menilai bahwa perubahan yang dihasilkan hanya sebatas perubahan perilaku saja tetapi tidak mencakup perubahan sistemik. Bahkan, prinsip partai hijau hanya dikatakan sebagai motto saja. Oleh karena itu PKB harus secara aktif untuk selalu membuat gagasan pro lingkungan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu dapat merasakan manfaat nyata dan tidak hanya dijadikan komoditas lima tahunan sekali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dobson, A. (2007). *Green political thought*. Routledge.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.
- Hidayat, H. (2008). *Politik lingkungan: pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ghani, R. (2017). *Komitmen PKB sebagai Partai Hijau*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/rghni/5874d610c022bde8193299d4/komitmen-pkb-sebagai-partai-hijau>
- Mustafa, H. (2014). *Partai Hijau Green Party Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/golodot/552fc0ef6ea834672e8b45c5/partai-hijau-green-party-indonesia>
- Müller-Rommel, F. (1994). Green parties under comparative perspective.
- Supratiwi, S. (2011). Partai Politik & Politik Hijau: Studi Tentang Kepedulian Parpol Terhadap Politik Yang ProLingkungan Di Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 109-117.
- Ramlan, S. (2005). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.